

Disparitas Mutu Pendidikan Di Wilayah Perbatasan (Refleksi Masyarakat Pinggiran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Hamza H. Wulakada¹

¹Geography Education, Nusa Cendana University, hamza.wulakada@staf.undana.ac.id

Keywords:

Disparity,
Education Quality,
Border Regions,

Abstract: Inclusive and equitable quality education and increasing lifelong learning opportunities for all is the target of SDGs 4 in line with the mandate of the 1945 Constitution. Disparities in development between regions can affect the quality of education so that this paper aims to capture the socio-cultural conditions of communities in border areas that have the potential to be used as instruments to hack inequality in the implementation of education between regions. The approach of literature studies and field observations to confirm secondary data is then carried out on parameter trend analysis compared to observation results. The presentation also uses a qualitative approach to describe margin data and content analysis to read data trends. The low level of accessibility is not only due to the lack of availability of facilities and infrastructure but also because the opportunity to reach access is relatively limited so that more learning outside the classroom is needed for students in border areas. The involvement of the community around the school environment along with all its local wisdom can spur the level of community participation in attending school. The concept of inclusive education should not be limited to the physical and mental limitations of students but also has technical regulations on the inclusiveness of education in border, outermost, remote and island areas.

Kata Kunci:

Disparitas,
Mutu Pendidikan,
Wilayah Perbatasan,

Abstrak: Pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua adalah target SDGs ke-4 selaras dengan amanat UUD 1945. Disparitas pembangunan antar wilayah dapat mempengaruhi mutu pendidikan sehingga tulisan ini bertujuan memotret kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan yang potensial dijadikan instrumen peretas ketidaksetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan antar wilayah. Pendekatan studi literatur dan observasi lapangan untuk mengkonfirmasi data sekunder kemudian dilakukan analisis kecenderungan parameter yang berbanding hasil observasi. Sajiannya juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan data margin dan analisis konten untuk membaca kecenderungan data. Rendahnya tingkat keterjangkauan bukan hanya karena minimnya ketersediaan sarana prasarana namun karena kesempatan menjangkau akses yang relatif terbatas sehingga dibutuhkan lebih banyak pembelajaran di luar kelas bagi pelajar di wilayah perbatasan. Pelibatan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah beserta segenap kearifan lokalnya dapat memacu tingkat partisipasi masyarakat untuk bersekolah. Konsep tentang pendidikan inklusif seyogyanya tidak terbatas pada keterbatasan fisik dan mental dari peserta didik tapi juga memiliki aturan teknis tentang inklusifitas pendidikan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan.

A. LATAR BELAKANG

Amanat konstitusi dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan bernegara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiganya berikutan karena langkah pertama adalah memastikan kesejahteraan itu terwujud secara mandiri dan berkeadilan sosial, dan untuk terpenuhinya kesejahteraan maka dibutuhkan masyarakat yang cerdas maka aspek pendidikan menjadi urusan penting sebelum masuk sebagai masyarakat global yang berdaya saing melaksanakan ketertiban dunia (Itasari, 2020). Ancaman perubahan iklim, krisis lingkungan, ketidaksetaraan dan masalah kemiskinan menjadi kesadaran universal masyarakat dunia dari 193 negara Anggota PBB yang melanjutkan masa transisi Sustainable Development Goals (SDGs) hingga disepakati Agenda 2030 dengan muatan 17 agenda dan 169 target. Salah satu agenda diantaranya adalah terkait Pendidikan berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua dengan muatan 7 target dan 3 rencana aksi turunannya (Bappenas (Ed.). (n.d., 2021).

Inklusifitas hadir karena adanya ketimpangan kualitas pendidikan antar individu maupun kelompok akibat berbagai faktor, termasuk distribusi pembangunan yang tidak merata dalam menjangkau seluruh komponen masyarakat di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan. Standarisasi mutu pendidikan perlu ditingkatkan agar kualitas lulusan mampu berdaya saing sebagai masyarakat global yang tidak tersisihkan karena timpang dalam proses pendidikannya (King, 2023). Kebijakan inklusif tidak hanya menjangkau keterbatasan fisik bagi pelajar berkebutuhan khusus namun juga harus diberlakukan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan sehingga isu kualitas pendidikan kelompok masyarakat di wilayah tersebut menjadi salah satu parameter ketimpangan antar wilayah. Masyarakat di wilayah tersebut cenderung memiliki kesempatan yang terbatas untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak sesuai standar mutu yang diharapkan karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, fasilitas dan sumber daya pendukung untuk standarisasi proses mutu pendidikan.

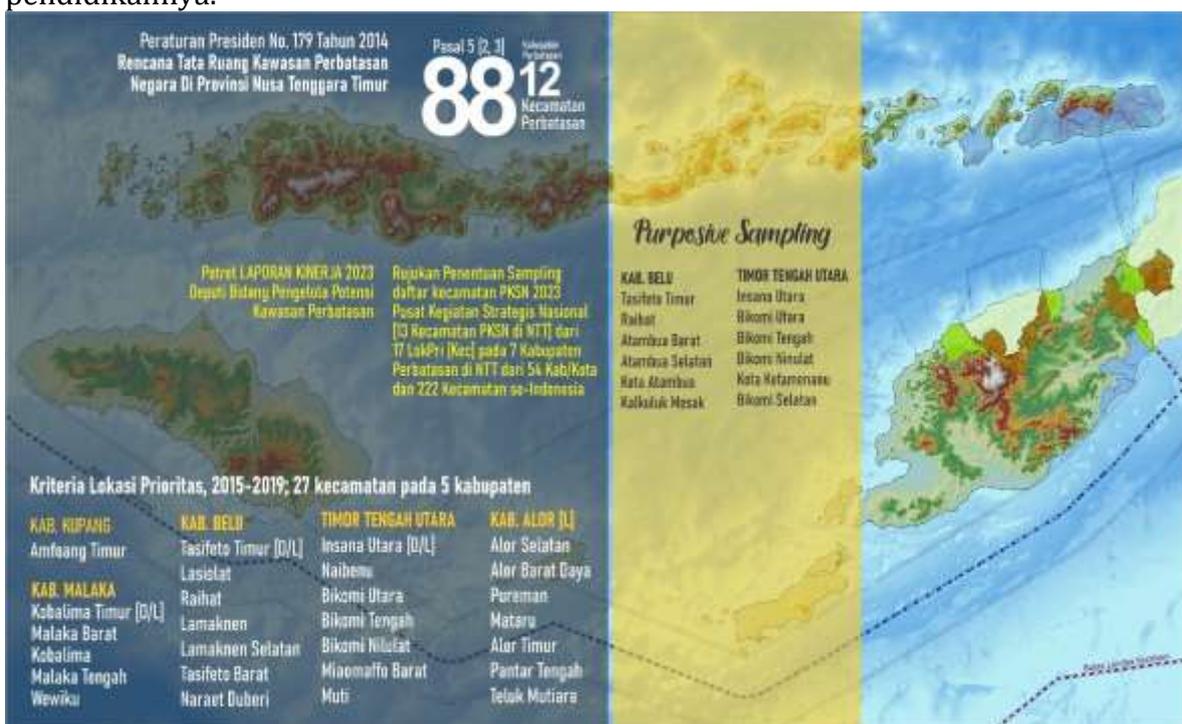
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 8 (delapan) standar mutu pendidikan yaitu; standar isi, standar proses, standar penilaian Pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar kompetensi lulusan. Parameter kualitas Pendidikan lainnya juga berupa Indeks Mutu Pendidikan (IMP), Standar Penjaminan Mutu Pendidikan (SMPI), Standar PISA (Program for International Student Assessment). Parameter IMP yang mencakupi 3 (tiga) dimensi dan 6 (enam) indikator, yaitu Siswa (angka mengulang, angka lulusan, angka putus sekolah), Guru [persentase guru layak mengajar, rasio siswa-guru], Prasarana Sekolah [rasio kelas baik dan layak], sementara parameter SMPI untuk pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, implementasi rencana peningkatan mutu, evaluasi/audit internal, dan penetapan standar mutu pendidikan. Standar PISA yang menjadi kesepakatan internasional hanya mengukur kemampuan anak usia 15 tahun dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan membaca, matematika, dan sains untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata (OECD, 2019).

Menurut JinJie (2023), kedelapan standar dimaksud hanya akan berujuk pada satu standar dalam mengukur kualitas pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan karena setelah terpenuhi semua standar input dan proses lainnya, asalkan tercipta minimum conditional for good learning maka kualitas lulusan telah mampu berdaya saing. Berbagai masalah sistem Pendidikan dunia umumnya ada 4 (empat), yaitu pemerataan (equity), mutu lulusan (Quality), efisiensi penyelenggaraan, dan relevansi hasil yang diproduksi sehingga kesenjangan tidak bisa hanya dipotret dari aspek

ketersediaan sarana/prasarana atau instrument input-proses lainnya. Penyetaraan mutu hanya bisa dilakukan dengan penentuan standar umum yang disepakati bersama sehingga sebagai bagian dari masyarakat dunia maka standar mutu lulusan Indonesia juga harus mengikut standar PISA.

Standar PISA Indonesai tahun 2022 masih berada di urutan 63 tingkat dunia, atauurut keenam dibawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Hasil standarisasi PISA menunjukkan kualitas Pendidikan Indonesia yang terukur dari pengetahuan dan keterampilan membaca (359 point), matematika (366 point), dan sains (383 point), yang umumnya rendah di daerah rural, wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan seperti sebagian wilayah di Indonesia bagian timur. Kemajuan sektor pendidikan suatu daerah terbaca dari beberapa parameter seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), termasuk dalam hal sains yaitu persentase peserta didik dalam menggunakan telepon seluler, menggunakan komputer dan mengakses internet bagi peserta didik (Rokhman Hum & Syaifudin, 2014).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan pintu selatan Indonesia, berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia menjadi ancaman terbesar, terlebih kondisi geografisnya yang berkepulauan sehingga ancaman rendahnya kualitas pendidikan sangat mungkin dialami oleh masyarakat di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 179 tahun 2014, terdapat 88 kecamatan pada 12 kabupaten di Provinsi NTT yang terkategori wilayah perbatasan karena berbatasan laut dan daerat dengan kedua negara tersebut. Artikel ini merefleksikan kondisi disparitas mutu pendidikan di wilayah perbatasan, khususnya beberapa kecamatan di Kabupaten Belu dan Kabupaten Timur Tengah Utara yang menjadi lokasi prioritas dalam kinerja Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan tahun 2023. Keresahan atas masalah pendidikan di kedua kabupaten dimaksud juga terkonfirmasi dalam pemberitaan Pos Kupang (Tanggur, 2024) dan Pos Kupang (Nong, 2024) sehingga perlu diketahui kualitas pendidikan di kedua kecamatan merujuk indikator pembangunan sektor pendidikannya.



Gambar 1. Peta Daerah Perbatasan di Provinsi NTT dan Lokasi Prioritasnya

B. METODE

Artikel ini disajikan sebagai invited speaker pada International Conference on science, applied science, teaching and education (ICoSASTE 3rd) Universitas Nusa Cendana yang bertema Integrating Technology and Education for Sustainable Development and Global Citizenship. Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2015 tentang Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah II Provinsi NTT atas kerjasama Kemendes dan Lembaga Penelitian UNDANA serta artikel yang disajikan dalam Seminar Nasional Geografi UNDANA 2021 dijadikan rujukan awal kemudian dilakukan konfirmasi data lapangan pada beberapa kecamatan sampel di Kabupaten Belu dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Pelaksanaan konfirmasi data lapangan bersamaan dengan berbagai pemberitaan terkait penyelenggaraan Pendidikan di wilayah perbatasan yang termuat dalam Harian Pos Kupang pada periode Januari-Juni 2024, lalu dilakukan studi literatur merujuk berbagai dokumen seperti Laporan Kinerja instansi terkait, statistik pendidikan NTT dan beberapa artikel ilmiah yang relevan.

Penentuan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan lokasi prioritas dalam Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan tahun 2023 (RIB (n.d.), 2024) yaitu 6 kecamatan di Kabupaten Belu dan 6 kecamatan di Kabupaten TTU. Data capaian program pendidikan melalui instrument penelitian diperoleh data primer dari instansi teknis terkait untuk memperoleh data sekolah sampel pada ke-12 kecamatan lalu dilakukan observasi lapangan pada beberapa sekolah terdekat untuk uji petik lapangan. Data lapangan dimaksud kemudian dibandingkan dengan data statistik pendidikan NTT tahun 2022 dan 2023 untuk dilakukan analisis kualitatif yang fokus pada rentang jangkauan terkait aspek ketersediaan fasilitas, keterjangkauan fasilitas dan kesempatan menjangkau fasilitas pendidikan terhadap parameter Angka Partisipasi Sekolah (APK) dan kemampuan literasi teknologi informasi. Penyajian hasil juga menggunakan analisis spasial untuk memetakan distribusi fasilitas serta memahami pola ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas Pendidikan di lokasi sampling (Purwanti, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Permasalahan Pendidikan di Wilayah Perbatasan

Provinsi NTT yang berkepulauan (1.192 pulau) dengan perbandingan luas wilayah laut dan daratan mencapai 70:30 persen, memiliki kondisi topografi berlereng (1.439 Km²), datar (246 Km²) dan lembah (1.668 Km²) terbentang di kedua kabupaten sampel. Pola permukiman penduduk tidak terkonsentrasi penuh karena mengikuti persebaran dukungan lahan garapan dan ketersediaan sumber daya alam setempat sehingga sulit diintervensi dalam perencanaan tata ruang wilayah. Total penduduk pada kedua kecamatan sampel sebanyak 231.008 jiwa (Kabupaten Belu) dengan laju pertumbuhan mencapai 2,13% dan kepadatan 100,26 jiwa/Km², sementara 271.277 jiwa (Kabupaten TTU) dengan laju pertumbuhan mencapai 1,58% dan kepadatan mencapai 101,61 jiwa/Km² (BPS NTT (n.d.), 2024). Kondisi kependudukan pada kecamatan sampel tersaji dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kondisi Penduduk di Kecamatan Sampel Tahun 2023

Wilayah Kabupaten/Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Tingkat Kepadatan	Rasio Jenis Kelamin
	(Jiwa)	(%)	(Jiwa/Km ²)	(%)
Kabupaten Belu	231,008	2.13	166	100.26
Kec. Tasifeto Timur	28,275	2.92	112	100.86
Kec. Raihat	14,897	1.35	198	100.36
Kec. Atambua Barat	25,358	1.75	1,508	102.38
Kec. Atambua Selatan	27,733	2.17	1,710	102.19
Kec. Kota Atambua	32,747	2.21	1,309	99.73
Kec. Kalkuluk Mesak	23,806	2.93	138	98.47
Kabupaten TTU	271,277	1.58	102	100.66
Kec. Insana Utara	10,715	1.93	199	101.75
Kec. Bikomi Utara	6,514	1.50	92	99.20
Kec. Bikomi Tengah	7,941	1.55	129	100.83
Kec. Bikomi Ninulat	4,992	1.44	61	97.23
Kec. Kota Kefamenanu	49,589	1.37	670	101.14
Kec. Bikomi Selatan	11,717	1.69	241	103.67

Sumber : Statistik BPS NTT, 2023 (BPS NTT (n.d.), 2024)

Tingkat kepadatan tidak merata karena beberapa diantaranya adalah kecamatan perkotaan dan lainnya kecamatan pedesaan di wilayah perbatasan terluar namun memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Belu dibandingkan pertumbuhan yang relatif kecil dan setara di Kabupaten TTU. Rasio jenis kelamin penduduk bervariasi yang umumnya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali kecamatan pedesaan di Kabupaten TTU dan kecamatan perkotaan di Kabupaten Belu.

Kondisi geografis dan demografis setempat berpotensi menimbulkan ketimpangan layanan sektor pendidikan karena pola persebaran penduduk yang tidak merata pada tingkat kepadatan terendah di kondisi ruang permukaan yang cenderung berbukit. Aksesibilitas antar desa cenderung rendah namun konektivitas sudah cukup baik meskipun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan belum baik menopang mobilitas penduduk di wilayah pedesaan sehingga permasalahan pendidikan bukan semata urusan kebijakan kependidikan belaka namun juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur publik lainnya. Upaya pemenuhan berbagai standar mutu pendidikan tidak mutlak dipengaruhi oleh aspek kebijakan sektor pendidikan semata melainkan dukungan sektor lainnya, baik berbentuk infrastruktur maupun suprastruktur dari pemerintah maupun kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Doriza, Purwanto & Maulida, 2012).

Menurut Erianjoni, Beri & Yusra (2023), permasalahan umum yang terjadi pada sektor pendidikan diantaranya adalah; pemerataan kesempatan, relevansi kebutuhan, ketersediaan sarana prasarana fisik, tingkat kemahalan biaya, standar kesejahteraan guru, kualitas dan kuantitas guru serta dukungan dan partisipasi publik. Hasil identifikasi lapangan dijumpai beberapa turunan masalah dan penyebabnya yaitu; kesempatan tidak merata akibat aksesibilitas, relevansi redah tingkat pendidikan dengan kebutuhan karena rasio ketersediaan fasilitas pendidikan, biaya penunjang proses penyelenggaraan pendidikan yang relatif tinggi karena sulitnya menjangkau

kebutuhan utama maupun penunjang, kualitas dan kuantitas guru karena minimnya daya dukung dan daya tarik bagi sarjana pendidikan untuk bermukim di wilayah pedesaan, rendahnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan akibat keterbatasan anggaran, serta dukungan dan partisipasi sosial budaya dari masyarakat yang terpola dengan orientasi pekerjaan domestik.

Potret awal dari permasalahan dimaksud membutuhkan intervensi kebijakan multisektor yang bersinergis dari berbagai tingkatan kebijakan dengan pelibatan partisipasi publik yang inklusif berdasarkan kondisi keterbatasan infrastruktur fisik maupun kendala sosial budaya setempat berbentuk suprastruktur. Pengalaman penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 pada kedua kecamatan sampel telah mendapatkan intervensi kebijakan sektor pendidikan namun kemampuan sumber daya penyelenggara maupun dukungan sosial budaya tidak mampu melanjutkan pola pembelajaran e-learning karena kemampuan adopsi dan adaptasi pola yang relatif rendah pasca post-covid. Perihal dimaksud menimbulkan ketidaktuntasan dalam standar input maupun proses sehingga menurunkan kualitas dan kompetensi lulusan pada periode dimaksud yang tertinggal lebih dari 3 (tiga) periode penyelenggaraan pendidikan. Artinya, pemerintah maupun penyelenggara Pendidikan membutuhkan stimulasi khusus untuk mengatasi ketimpangan kualitas selama diterpa covid maka apapun intervensi kebijakan yang sedang diupayakan hanya bagian dari pemulihan standar post-pasca covid.

2) Standarisasi Mutu dan Pendidikan Inklusif di Wilayah Perbatasan

Demetriou & Spanoudis (2018) menekankan pentingnya akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan sehingga secara simultan harus fokus mengevaluasi input, proses dan output. King (2023), memperluas cara pandang tentang mutu yang dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti keunggulan (*excellence*), kecocokan (*fitness for purpose*), nilai tambah (*value added*), dan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) sehingga hasil akhir yang berdaya saing unggul dan bermanfaat yang diharapkan pengguna harus disiapkan dari tahap awal input, proses hingga output maka dibutuhkan standarisasi atas kualifikasi lulusan. Jaminan mutu (*quality management*) ditentukan oleh *quality control* untuk mengendalikan hasil ujian/*assessment* dan *quality assurance* untuk menjamin pengaturan input dan proses agar bermanfaat dan efisien sehingga kurikulum, sarana dan metodologi sebagai *tools* pengendalinya (Benavot, 2016).

Berbagai standar mutu yang tersaji sebelumnya telah diketahui dan disepakati bersama oleh para pihak, terdefiniskan dan terartikulasikan dengan baik serta memiliki standar kompetensi lulusan per mata pelajaran, bukan sekedar mendefinisikan standar proses sehingga aspek input dan proses cukup menjadi *minim condition for good learning*. Kompetensi lulusan dari standar nasional pendidikan Indonesia telah tersedia per jenjang dan kategori unit pendidikan yang mencakupi dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan namun belum per mata pelajaran yang merupakan standar input dan proses. Konteks inilah kini tengah dikembangkan melalui kurikulum merdeka belajar yang berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel dan berkarakter Pancasila sehingga membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri Pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Persoalannya adalah komitmen dan kapasitas sumber daya pengelola dan penyelenggara pendidikan di daerah tidak mampu

mengartikulasikannya dalam tataran praktis dan komprehensif berorientasi output lulusan. Kondisi demikian banyak ditemukan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan karena tidak mampu mengartikulasikan konsep merdeka belajar sesuai *minim condition for good learning*.

Keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana menjadi kesimpulan awal yang membuat paradigma pengelola dan penyelenggara pendidikan di daerah cenderung memprioritaskan penyediaan kebutuhan infrastruktur fisik dan mengenyampingkan elemen utama penyelenggara pendidikan yaitu kualitas dan kesejahteraan guru serta kondisi awal peserta didik. Bahwa kelayakan gedung beserta prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan menjadi aspek penting dalam proses namun dapat dioptimalkan pemanfaatannya dengan dan dalam kondisi minimum untuk keberlangsungan pembelajaran yang baik. Perihal demikian terkonfirmasi oleh berbagai kasus lapangan dimana beberapa sekolah yang sudah cukup layak kondisi gedung dan fasilitas penunjangnya namun minim ketersediaan guru, bahkan jaminan kesejahteraan guru di daerah perbatasan pun masih dibawah standar kelayakan. Pada kondisi lainnya masih terdapat beberapa sekolah yang tidak memiliki fasilitas terstandar namun mampu menghasilkan lulusan berkompeten sesuai standar kelulusan sehingga realitas ini menjadi anomalis jika dipetakan permasalahannya.

Beberapa sistem standarisasi lainnya yang terukur seperti Indeks Mutu Pendidikan (IMP), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan skala internasionalnya adalah PISA, hampir semuanya menerapkan parameter yang saling beririsan. IMP menjadi alat ukur untuk menilai dan membandingkan kualitas pendidikan di berbagai tingkatan dengan menggabungkan indikator aspek akses, kualitas dan hasil pendidikan sehingga diperlukan validitas data yang akurat sebagai pembanding antar negara sehingga tidak hanya mencerminkan hasil akademik belaka namun juga bagaimana pendidikan dapat mendorong perkembangan sosial ekonomi serta relevan dengan kebutuhan masa depan (Kennedy, 2019). Sementara pendekatan SPMP lebih menekankan pada pentingnya keterlibatan seluruh stakeholder (pemerintah, sekolah dan masyarakat) dalam proses penjaminan mutu sehingga menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi peningkatan yang efektif karena di dalamnya terjadi umpan balik yang konstruktif (Widiputera & Agung, 2023). Konteks inilah menjadi sorotan karena lingkup urusan standarisasi mutu pendidikan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan masih menjadi urusan institusional yang mekanistik dari sekolah dan pemerintah tanpa mempertimbangkan partisipasi dan kolaborasi dari masyarakat. Pelibatan masyarakat hanya terbuka melalui wadah Komite Sekolah yang tidak diaktifkan dan sekedar formalistik tanpa ada mekanisme kolaboratif masyarakat setempat dalam mewujudkan mutu pendidikan.

Merujuk Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif (Arriani (n.d.), 2024), dalam pengantarnya bahwa UU Sisdiknas mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus menjadi 3 kategori, yaitu; (1) anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial; (2) anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dan (3) anak di daerah terpencil dan terbelakang. Realitasnya, khusus point ketiga tidak dijelaskan teknisnya dalam regulasi turunan dan aturan teknisnya sehingga luput dari kebijakan dan sehingga tidak terimplementasikan di lapangan. Fokus pendidikan inklusif hanya dipandang sebagai personifikasi manusianya karena

paradigma yang dibangun hanya menyoroti plus-minus dari tiap individu peserta didik tanpa melihat aspek eksternal dari lingkungan, terlebih ketertinggalan yang disebabkan oleh disparitas pembangunan antar ruang dan wilayah. Anak dan peserta didik di wilayah perbatasan, terluar, tertinggal dan kepulauan hanya menjalani rutinitasnya bersekolah tanpa ada upaya serius dari stakeholder yang secara sistemik memikirkan masa depan seperti apa anak-anak itu akan dihantarkan dalam input dan proses penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan masa depan dirinya untuk pembangunan daerah. Hasil review dokumen kebijakan di daerah sampel menunjukkan bahwa tidak ditemukan perencanaan kebijakan sektor pendidikan jangka menengah-panjang yang secara sistemik mengorientasikan mutu lulusan berbasis kualifikasi kebermanan anak untuk menjawab daya saing lulusan masa depan dan memberikan kontribusi balik untuk kemajuan pembangunan daerahnya.

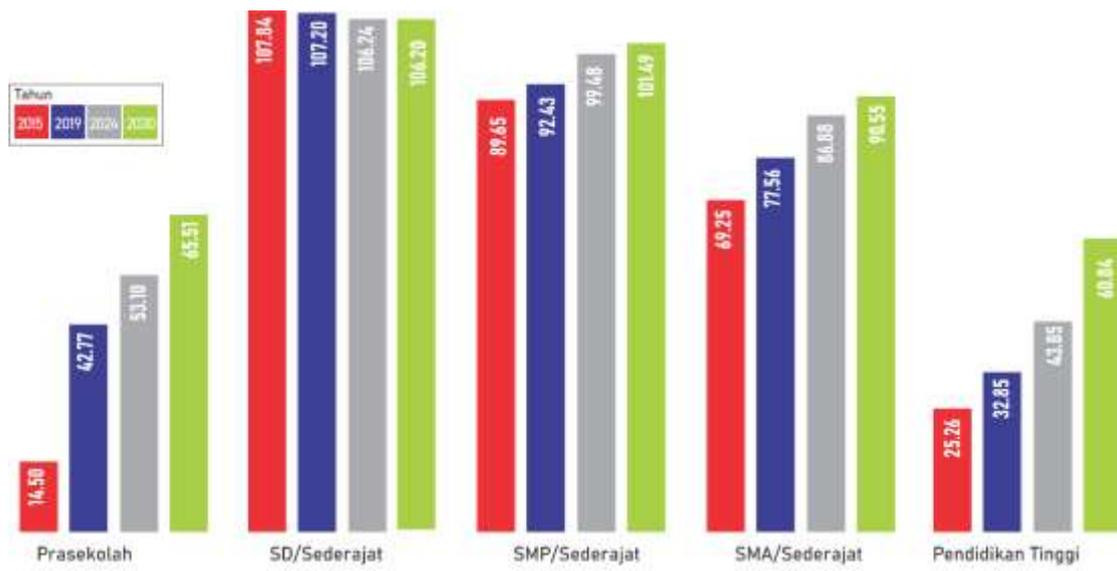
Sistem dukungan pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan peran dan tanggung jawab berbagai stakeholder (pemerintah, masyarakat, orang tua dan satuan pendidikannya), baik langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dalam hal ini adalah dunia usaha dan dunia industri (DIDU), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan lainnya mengawal hingga output, sementara orang tua terlibat aktif selama input-proses melalui keanggotaan dalam wadah Program Pendidikan Inklusif (PPI). Peran PPI membuat keputusan Pendidikan bagi peserta dan menangani masalah seperti; kelayakan, evaluasi, pengembangan program dan penempatan PDBK dalam pendidikan inklusif. Sementara dukungan dari satuan pendidikan oleh para pihak (kepala sekolah, guru pembimbing khusus dan guru umum, teman sebaya dan OSIS) berkolaborasi memenuhi kebutuhan peserta didik. Konteks ini cenderung difokuskan kepada manusianya (PDBK; Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) yang berketerbelakangan mental dan/atau berkelebihan khusus, tidak diorientasikan berdasarkan keterbelakangan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan berkepulauan. Kondisi lapangan terpantau kendala keterbatasan jumlah dan kapasitas guru, tidak memiliki guru pembimbing khusus (semacam Guru BP), teman sebaya tidak tereduksi dan tidak aktifnya OSIS dalam mengakomodir program dimaksud sehingga disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif belum diimplementasikan bagi peserta didik dan masyarakat di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan.

3) Trend Angka Partisipasi Sekolah di Wilayah Perbatasan

Penelitian ini memilih Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menjadi indikator kemajuan pendidikan suatu daerah dari standar BPS meskipun komponen pembentuknya hanya sebatas data kuantitatif, tidak menyajikan kualitas dari peserta didik namun dapat dijadikan acuan karena seleksi kualitatif hanya bisa dimulai dari persentase kuantitatif. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian terhadap pendidikan, sementara rendahnya angka partisipasi menunjukkan adanya hambatan dalam akses pendidikan sehingga perlu analisa kontekstual dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kebijakan pendidikan. Wijayanti, Suwartono & Kusuma (2022) menyoroti faktor ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendidikan (gedung, kelas, alat bantu belajar), infrastruktur penunjang (listrik, jaringan internet, air dan jalan), serta sumber daya guru dan tata kelola sekolah menjadi daya tarik yang mendorong dan/atau menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Latar belakang sosial, ekonomi dan budaya yang membentuk paradigma

masyarakat menjadi faktor eksternal yang sering luput dari perhatian padahal peserta didik berasal dari komunitas masyarakat sekitarnya.

APS beserta indikator turunan lainnya menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan kinerja di suatu daerah, bukan hanya sektor pendidikan melainkan semua kebijakan penunjang lainnya seperti per kapita rumah tangga, keuangan daerah, kemiskinan dan derajat kesejahteraan masyarakat yang mendorong atau menghambat urgensi bersekolah bagi anak-anak di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan. Ketersediaan dan kelayakan infrastruktur, keterjangkauan akses serta kesempatan menjangkau adalah alasan konkrit bagi masyarakat untuk tidak merasa penting bersekolah. Gambar berikut menunjukkan trend dan proyeksi APS setiap tingkatan pendidikan di Indonesia kedepannya yang terakumulasi dari kondisi APS seluruh wilayah Indonesia (BPS NTT (n.d.), 2024).



Gambar 2 Trend dan Proyeksi Angka Partisipasi Sekolah Indonesia, Tahun 2015 s/d 2030

Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyiapkan generasinya memulai pendidikan prasekolah terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 karena adanya kebijakan (PP Nomor 13 Tahun 2015) yang mewajibkan batas usia minimum memulai pendidikan dasar meski belum ada kewajiban untuk prasekolah sebelum SD. Partisipasi untuk SD/ sederajat justru menurun perlahan 10 tahun belakangan justru bagus karena memilih masuk SD tepat usia 7 tahun dan stabil lulus dengan usia kelulusan sebelum 13 tahun sehingga kondisi demikian yang diharapkan sebagaimana data APS tingkat SMP, SMP dan PT yang secara perlahan meningkat 10 tahun belakangan. Kondisi stagnan justru terjadi pada penduduk usia SMP yang tidak lulus tepat usia namun berpartisipasi untuk melanjutkan pendidikan atas relatif baik meningkat 10 tahun terakhir dan sedang menuju titik stabil pada tahun 2030. Artinya, pada tahun 2030 ditargetkan tertinggal 9% penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada batas usianya dan sebagian besar yang sempat mengenyam pendidikan atas justru melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Data proyeksi menunjukkan bahwa lebih dari 40% anak usia prasekolah pada tahun 2030 yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah dan langsung memulai dari

pendidikan dasar yang meskipun proporsinya lebih dari 106% karena masih terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang duduk di bangku SD tapi diantaranya terdapat 6.76% yang tidak lanjut studi ke jenjang SMP. Kondisi APS 2024 menunjukkan bahwa rentan usia sekolah antar tingkatan pendidikan sudah stabil dimana kesadaran untuk memulai pendidikan prasekolah menjadi penting untuk prakondisi perkembangan anak usia dini lalu patuh untuk memulai pendidikan dasar sesuai batas usianya yang lulus tepat usia. Penetapan wajib belajar 12 tahun yang terhitung sejak SD sampai SMA mengakibatkan rerata APS cukup stabil pada periode sekolah SD hingga SMA, sehingga dapat dipertimbangkan agar standar wajib sekolah kelaknya di tahun 2030 dapat berlangsung prasekolah (1 tahun) kemudian melanjutkan SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, SMA 3 tahun dan PT kurang dari 4 tahun. Proyeksi tahun 2030 juga menunjukkan partisipasi masyarakat untuk berkuliah semakin tinggi karena tuntutan status keserjanaan dalam dunia kerja.

Sementara data trend APS NTT selama 5 tahun terakhir untuk setiap kategori tingkat pendidikan cenderung fluktuatif dengan variasi yang relatif kecil setiap tahunnya. Data berikut menunjukkan bahwa Angka Kesiapan Sekolah (AKS) masyarakat NTT mengalami trend positif dimana lebih dari 50% siswa kelas 1 SD/ sederajat pernah mengikuti pendidikan pra sekolah karena adanya program PAUD, dan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/ sederajat namun tidak melanjutkannya ke tingkat SMA/ sederajat lebih dari 25%. Budaya patriarki masyarakat NTT yang cenderung menyekolahkan anak laki-laki dibanding anak perempuan terkonfirmasi mengalami pergeseran yang signifikan selama 12 tahun terakhir dimana trend kesiapan sekolah pada kaum perempuan lebih tinggi 6,94 poin dibanding laki-laki. Anak perempuan dianggap lebih patuh dan tertib mengikuti proses pendidikan hingga sukses dan berprestasi menamatkan pendidikan dibanding anak laki-laki, sementara perbandingan antar wilayah perkotaan dengan pedesaan hanya mengalami margin pembeda sebesar 0,66 point. Hal demikian mengisyaratkan bahwa isu pemerataan akses pendidikan pra sekolah menurut gender jauh lebih memprihatinkan dibandingkan determinasi antar wilayah.

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi NTT, Tahun 2019 s/d 2023

Tingkatan Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PraSekolah	53.05	53.98	54.02	53.22	54.59
SD/Sederajat	98.47	98.57	98.42	98.59	98.62
SMP/Sederajat	95.11	95.25	95.32	94.83	94.89
SMA/Sederajat	75.36	75.52	75.77	75.55	75.93
Perguruan Tinggi	31.48	31.47	32.41	32.12	33.03

Sumber : Statistik BPS NTT, 2023 (BPS NTT (n.d.), 2024)

Isu gender dalam partisipasi sekolah di NTT berlaku untuk setiap tingkatan pendidikan namun isu disparitas wilayah mengalami penurunan dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi karena akses mendapatkan layanan pendidikan setingkat SMA hingga perguruan tinggi relatif sulit tersedia sehingga kesiapan sekolah mengalami

penurunan hingga 26% tingkat SMA/ sederajat dan lebih dari 78% tingkat perguruan tinggi. Dorongan untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang di atasnya lebih tinggi terjadi pada kaum perempuan di perkotaan, sementara di wilayah pedesaan justru lebih diprioritaskan oleh kaum laki-laki yang mengisyaratkan bahwa masyarakat perkotaan lebih mementingkan pilihan bersekolah anak atas kualitas dan menggapai prestasi dibanding masyarakat pedesaan yang mendorong anak bersekolah hanya untuk alasan bisa berpendidikan layak untuk kamu laki-laki.

Margin APS pada tiap tingkatan pendidikan selama 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan mendasar namun terjadi margin yang tinggi saat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Perihal ini mengindikasikan bahwa dorongan untuk menuntaskan derajat pendidikan anak cenderung dipengaruhi faktor sosial-budaya namun mengalami kendala dari sisi ekonomi karena biaya untuk perguruan tinggi relatif mahal. Masyarakat pedesaan berkesiapan untuk melanjutkan pendidikan anaknya namun investasi bersekolah pada perguruan tinggi cenderung mahal karena minimnya ketersediaan insitusi perguruan tinggi di daerah, mahalnya pembiayaan kuliah hingga biaya hidup selama berkuliah yang relatif tinggi sehingga pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi mengalami penurunan margin yang cukup signifikan mencapai rata-rata 78,3% selama 5 tahun terakhir.

Parameter penyerta lainnya seperti APM dan APK juga mengindikasikan beberapa hal dalam menilai tingkat partisipasi sekolah masyarakat NTT yaitu; [1] anak perempuan di pedesaan maupun perkotaan cenderung memulai sekolah tepat waktu dan mampu menyelesaikan studi pada setiap tingkatan pendidikan tepat waktu, [2] anak laki-laki cenderung tidak disiplin dalam memulai sekolah sesuai kecukupan umur dan tidak mampu menuntaskan studi pada tingkatan pendidikan tertentu secara tepat waktu, [3] angka putus sekolah pada level pendidikan dasar dan menengah lebih banyak terjadi pada anak perempuan di pedesaan, sementara pada tingkatan pendidikan atas dan tinggi justru terjadi pada anak laki-laki, [4] anak perempuan meskipun kecil proporsinya dibanding laki-laki dalam bersekolah tapi cenderung lebih konsisten menuntaskan pendidikan hingga perguruan tinggi. Realitas ini mengindikasikan bahwa anak perempuan cenderung akan berhasil melewati masa kritis untuk putus sekolah pada level SMA, jika sudah berhasil tamat SMA maka cenderung lebih potensial melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Sementara anak laki-laki harus mengalami fase kritis ancaman putus sekolah dari level SMP/ sederajat sehingga motivasi bersekolah anak laki-laki usia 13 tahun ke atas perlu diperkuat.

Bacaan data APS beserta parameter penyerta lainnya di Provinsi NTT (BPS NTT (n.d.), 2024) menggambarkan kondisi 22 kabupaten/kota se-NTT namun khusus daerah sampel (Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka) masih dalam taraf toleransi jika dilakukan rasio perbandingan antar kabupaten untuk semua jenis parameter per tiap tingkatan pendidikan karena diantara deretan 3 kabupaten dengan APS, AKS, APM, dan APK terendah tidak dialami kedua kabupaten sampel. Kabupaten TTU lebih progresif tingkat partisipasinya dibanding Kabupaten Belu hampir pada setiap jenjang Pendidikan, terlebih ekstrim terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Belu yang masih sangat minim akses pendidikan beserta komponen input-proses dalam penyelenggaraan pendidikan. APS untuk pra sekolah dan SD/ sederajat di Kabupaten Belu dan TTU lebih tinggi di atas rata-rata APS NTT menunjukkan bahwa kesadaran

masyarakat Belu dan TTU untuk bersekolah cenderung lebih tinggi dari daerah lainnya namun hanya berlaku pada tingkat pra sekolah dan pendidikan dasar.

Partisipasi sekolah masyarakat di Kabupaten Belu dan TTU mengalami penurunan saat memasuki jenjang SMP/ sederajat dan seterusnya hingga pendidikan tinggi sebagaimana terbaca margin yang relatif lebih rendah setiap tahunnya untuk kategori tingkat pendidikan SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi. Penduduk usia 13 tahun ke atas di Kabupaten TTU dan Belu sudah terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, bahkan mengalami ancaman putus sekolah yang sangat tinggi di tingkatan SMA/ sederajat dan memilih cenderung tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Anak perempuan di Kabupaten TTU dan Belu cenderung lebih tinggi partisipasi sekolahnya pada tingkat pendidikan pra sekolah dan sekolah dasar meskipun terbatas kesempatan untuk sekolahnya, sementara anak lelaki di pedesaan meningkat partisipasinya seiring kesempatan bersekolah saat pendidikan dasar namun menurun saat melanjutkan ke jenjang SMA dan perguruan tinggi. Kesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi secara sosial budaya diberikan lebih luas oleh penduduk di pedesaan kepada anak laki-laki namun partisipasi mengalami penurunan, berbanding terbalik dengan anak perempuan yang memiliki kesempatan terbatas namun partisipasi menjadi sarjana relatif lebih tinggi.

Tabel 3 APS, APK, APM Provinsi NTT, Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU untuk setiap tingkatan Pendidikan pada tahun 2023

Angka partisipasi	Jenis Kelamin		Wilayah		Total
	K	D	L	P	
Pra Sekolah PAUD					
APS NTT	24.61	27.24	26.53	26.74	26.63
Belu	24.94	34.4	33.75	30.18	31.99
TTU	29.91	33.61	35.39	29.61	32.71
APK NTT	34.83	33.89	30.13	35.72	34.38
Belu	54.8	41.01	34.11	52.07	47.55
TTU	40.02	39.98	29.63	44.45	40.01
APM NTT	33.78	32.96	30.13	34.41	33.39
Belu	52.19	38.82	34.11	48.88	45.16
TTU	36.19	35.79	29.63	38.76	36.02
SD/Sederajat					
APS NTT	99.65	98.29	98.36	98.88	98.62
Belu	97.81	97.83	99.3	96.35	97.83
TTU	100	98.68	99.46	98.38	98.9
APK NTT	112.4	110.29	111.24	111.38	111.35
Belu	109.31	115.13	116.44	110.73	112.22
TTU	125.13	107.05	141.43	110.6	115.83
APM NTT	95.99	95.97	96.12	95.83	95.98
Belu	96.99	95.31	97.55	93.93	95.75
TTU	99.55	95.61	97.65	94.98	96.28
SMP/Sederajat					
APS NTT	97.38	94.01	93.31	96.51	94.89
Belu	93.31	92.19	87.72	97.22	92.51
TTU	85.12	98.14	93.29	97.74	95.4
APK NTT	89.64	90.67	87.61	93.29	90.41
Belu	76.5	80.81	82.65	76.59	79.61
TTU	75.65	90.89	87.18	88.23	87.68
APM NTT	74.11	73.24	71.14	75.87	73.47
Belu	65.07	64.6	66.21	63.28	64.73
TTU	59.87	70.81	64.4	73.04	68.51

Angka partisipasi	Jenis Kelamin		Wilayah		Total
	K	D	L	P	
SMA/Sederajat					
APS NTT	79.91	74.32	75.24	76.61	75.93
Belu	65.95	61.79	65.88	60.52	62.91
TTU	77.88	73.44	78.04	71.02	74.32
APK NTT	101.63	83.43	86.94	90.37	88.66
Belu	78.14	70.29	72.4	72.4	72.4
TTU	93.75	78.52	89.22	74.71	81.54
APM NTT	64.62	55.53	56.55	59.74	58.15
Belu	48.11	46.89	48.94	45.84	47.22
TTU	60.09	54.21	52.5	57.94	55.38
Perguruan Tinggi					
APS NTT	48.17	26.22	31.61	34.59	33.03
Belu	13.23	16.66	20.79	10.39	15.72
TTU	46.53	29.39	29.38	34.62	31.76
APK NTT	52	23.95	30.27	35.28	32.65
Belu	8.72	7.68	10.91	4.87	7.97
TTU	65.26	29.04	24.26	45.83	34.04
APM NTT	34.91	14.45	19.48	22.24	20.79
Belu	4.29	5.53	10.13	23.38	5.19
TTU	23.96	19.25	10.89	30.77	19.9

Anak perempuan cenderung tuntas menjalankan proses studinya di setiap tingkatan pendidikan bersamaan dengan naiknya tingkat partisipasi namun perempuan memiliki kesempatan terbatas untuk melanjutkan studi, sementara anak laki-laki yang diberikan kesempatan lebih luas untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi justru tidak tuntas menjalani prosesnya dengan margin mencapai 3,17 point. Kondisi demikian selaras dengan pergeseran paradigma masyarakat yang berinvestasi untuk pendidikan anak sudah mulai bergeser dari anak laki-laki yang dianggap lebih bertanggung jawab untuk masa depannya kepada anak perempuan yang dipahami akan keluar dari rumpun keluarga inti pasca kawin mengikuti suaminya. Ketersediaan sarana pendidikan beserta suprastruktur penunjang pendidikan di perkotaan cukup berpengaruh mendorong partisipasi bersekolah masyarakat perkotaan, sebaliknya akses terhadap infrastruktur pendidikan yang terbatas dan kesempatan bersekolah yang rendah menjadi penyebab rendahnya partisipasi sekolah masyarakat di pedesaan, wilayah perbatasan, terluar, tertinggal dan kepulauan. Margin tingkat partisipasi sekolah antar wilayah perbatasan dengan wilayah terdepan mencapai 7.15 point disebabkan karena terbatasnya kesempatan anak-anak di pedesaan yang tersandera harus terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarga. Rekapitan data perbandingan APS, APK dan APM untuk tiap tingkatan pendidikan di Provinsi NTT, Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU pada tahun 2023 tersaji dalam tabel 3.

Ketersediaan lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten TTU rupanya cukup berdampak terhadap tingginya partisipasi masyarakat TTU untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi meskipun relatif masih rendah dari rata-rata NTT namun masih lebih baik dibanding partisipasi dari masyarakat di Kabupaten Belu. Posisi geografis kedua kabupaten yang saling berdekatan harusnya mampu menarik minat berkuliah masyarakat di Kabupaten Belu namun realitasnya kehadiran perguruan tinggi negeri di Kabupaten TTU tidak signifikan menarik minat berkuliahnya. Kondisi demikian menggambarkan bahwa faktor keterjangkauan akses terhadap pendidikan tinggi tidak mutlak mempengaruhi minat berkuliah melainkan kendala faktor daya dukung lingkungan perkuliahan dan jalinan kemitraan kedua kabupaten yang harus diperbaiki agar mendorong minat berkuliah masyarakat di Kabupaten Belu. APS untuk perguruan tinggi di Kabupaten Belu hanya 5,19 point, atau margin mencapai 14 point dibanding Kabupaten TTU sebagai indikasi argumentasi dimaksud, bahkan anak perempuan dari pedesaan di Kabupaten Belu yang justru lebih tinggi partisipasinya dibanding anak laki-laki.

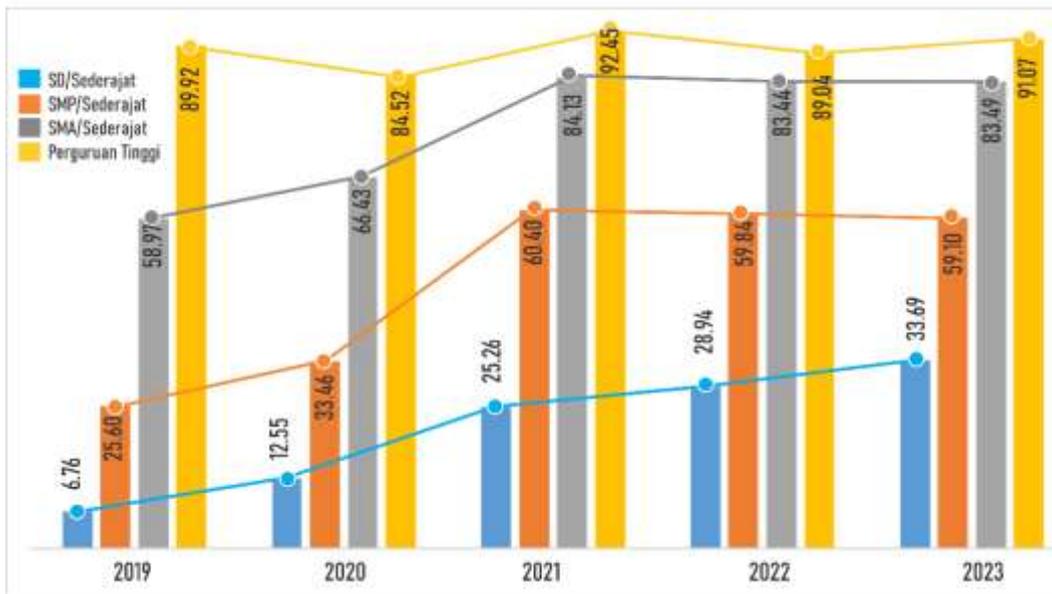
4) Literasi Digital Peserta Didik di Wilayah Perbatasan

Demetriou & Spanoudis, (2018) berpendapat bahwa keterampilan literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan dan mengoperasikan perangkat digital namun mencakup kemampuan berpikir kritis dan berkolaborasi dalam lingkungan digital. Kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi dan menguji validitasnya melalui kemampuan berpikir kritis disertai argumentasi rasional cukup diperlukan bagi generasi muda dan pelajar dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ketersediaan perangkat teknologi disertai jaringan sistem informasi dapat memudahkan pelajar mengakses semua sumber pengetahuan secara bebas tidak terkendali dari internet sehingga jika tidak dibentengi dengan kemampuan berpikir kritis dan sistematis maka para pelajar justru terjebak dalam jebakan dampak negatif kehadiran internet.

Dukungan jaringan sistem informasi selayaknya dimanfaatkan secara terbatas dan terkendali untuk kegiatan pembelajaran siswa di sekolah sehingga mampu menjadi instrument mendapatkan pengayaan pengetahuan pada dunia luar. Informasi yang tersaji dalam jaringan internet dapat menjadi sumber pengetahuan bila dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai sumber rujukan ilmiah, digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar, menjadi medium mengakses komunikasi dengan dunia luar serta memudahkan evaluasi pencapaian ketuntasan belajar. Batasan akses dan kategori informasi yang selayaknya diperoleh melalui atribut teknologi menurut usia dan tingkat pendidikan juga harus diselaraskan agar tidak terjadi ketimpangan dalam menangkap, menganalisa dan mengkonsumsi perimbangan informasi atau pengetahuan yang layak (Benavot, 2016).

Kapasitas literasi pelajar dan mahasiswa terukur dari parameter kesempatan dan kemampuan teknis memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komputer yang secara simultan mengalami peningkatan signifikan pasca Covid-19. Serangkaian kegiatan pembelajaran dialihkan dari pembelajaran secara tatap muka (luar jaringan; luring) menjadi pertemuan online (dalam jaringan), bahkan diwajibkan untuk seluruh tingkatan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia. Pengalaman demikian juga dialami pelajar di NTT yang berada di wilayah perbatasan, daerah terluar, tertinggal dan kepulauan meskipun dukungan jaringan internet dan perangkat teknologinya masih sangat terbatas. Kebijakan nasional untuk pemulihan paca-Civid di sektor Pendidikan salah satunya adalah menstimulasi pengadaan seperangkat TIK untuk kegiatan pembelajaran online namun kondisi di wilayah perbatasan, terluar dan kepulauan justru terkendala dukungan teknis kelistrikan, keterjangkauan jaringan internet beserta kemampuan guru dalam memberikan edukasi kepada peserta didiknya (Mamengko dkk, 2023). Bahkan fungsi kontrol dari keluarga dan lingkungan masyarakat juga harus mengikuti perubahan seketika dalam proses pembelajaran sehingga beban tanggung jawab proses pembelajaran dan pendidikan yang semulanya tertumpu pada manajemen sekolah teralihkan sebagian kepada keluarga dan masyarakat.

Kondisi demikian terus berlanjut selama masa pandemi covid-19 namun hanya berjalan efektif selama 2 (dua) tahun hingga post-pasca covid, kegiatan pembelajaran di sekolah sudah kembali aktif menggunakan pendekatan tatap muka namun beberapa kebiasaan baru selama masa pandemic masih tetap digunakan seperti penggunaan perangkat TIK. Data Statistik Pendidikan NTT (BPS NTT (n.d.), 2024) menunjukkan persentase peserta didik yang mengakses internet, menggunakan computer dan telepon genggam mengalami peningkatan signifikan pada periode 2021 (post-pasca covid-19) namun kembali fled pasca tahun 2022. Bahkan penggunaan computer dan telepon genggam mengalami penurunan sejak tahun 2022-2023 namun pemanfaatan jaringan internet mengalami kenaikan 2% dari 51,30% (2021) menjadi 53,44% (2023). Penurunan penggunaan perangkat computer dan telepon genggam semakin menurun pasca kembalinya pembelajaran offline namun jaringan internet masih tetap dimanfaatkan untuk berbagai layanan pendidikan dan kependidikan.



Sumber : Statistik Pendidikan NTT, 2023

Gambar 3. Trend Penggunaan Internet oleh Pelajar/Mahasiswa di NTT, Tahun 2019 s.d 2023

(Wulakada (2021), memaparkan berbagai kendala yang dihadapi pelajari di wilayah terluar, terpencil, perbatasan dan kepulauan selama penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di masa pandemic Covid-19 yaitu keterbatasan jaringan telekomunikasi. Pemerintah pusat melalui program pemulihan pasca Covid-19 mendorong peningkatan layanan internet bagi seluruh masyarakat NTT agar meretas keterisolasian dari akses internet dan sistem informasi. Kondisi topografi wilayah dan pola sebaran permukiman yang tidak terkonsentrasi memungkinkan rendahnya aksesibilitas jaringan internet karena rasio perbandingan tower *Base Transceiver System* (BTS) tidak berbanding standar dengan jumlah calon penggunaanya. Data jumlah BTS di NTT yang terbatas 421 unit sebelum covid kemudian diintervensi hingga bertambah 120 unit di tahun 2021 kemudian mengalami peningkatan hingga 541 unit pada tahun 2023 dengan kapasitas standar 4G sehingga dalam kondisi dimaksud diharapkan mampu terakses lebih dari 85% wilayah di Provinsi NTT meskipun dengan keterjangkauan jaringan yang tidak representatif untuk kegiatan pembelajaran.



Sumber : (a) Statistik Pendidikan, 2023 (diolah), dan (b) data primer

Gambar 4. Penggunaan Perangkat Digital; (a) Trend Penggunaan TIK oleh Penduduk Usia 7-24 tahun di NTT tahun 2019-2023, (b) Penggunaan TIK oleh Penduduk Usia 7-24 tahun di Belu-TTU, 2024

Gambar di atas menunjukkan persentasi penduduk usia 7 sampai 24 tahun yang menggunakan perangkat teknologi berupa computer, mengakses internet dan menggunakan HP untuk skala Provinsi NTT selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi yang sama pada tahun 2024 di lokasi sampling. Kondisi dimaksud menunjukkan bahwa perangkat komputer (PC/laptop) menjadi barang langka yang hanya digunakan kurang dari 54% pelajar/mahasiswa di NTT. Ketersediaan jaringan internet cukup akomodatif untuk digunakan tapi pelajar lebih memilih mengakses untuk kebutuhan pembelajaran melalui handphone dibanding laptop karena lebih praktis dan multiguna. Sementara komputer cenderung tidak intensif digunakan dalam proses pembelajaran karena bentuk penugasan sudah dapat dilakukan dengan handphone sehingga fungsinya tergantikan oleh handphone namun khusus mahasiswa ketergantungan pada laptop cukup signifikan hampir sebanding dengan penggunaan handphone.

Gambar 4 (b) terpotret di lokasi sampling (72 sekolah di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU) menunjukkan bahwa optimasi penggunaan komputer masih relatif rendah meskipun jaringan dan kapasitas internet sudah cukup representatif. Pelajar lebih memilih menggunakan handphone untuk kegiatan pembelajaran karena praktis dan tidak memiliki computer kecuali tersedia oleh sekolahnya yang terbatas waktu penggunaan dalam pembelajaran. Ketersediaan jaringan internet tidak dioptimalkan oleh pihak sekolah untuk memandu proses pembelajaran menggunakan computer, sementara alokasi pemanfaatan *handphone* yang tinggi justru sebagian besarnya digunakan untuk kegiatan non-pembelajaran di sekolah. Kondisi berbeda dengan mahasiswa yang lebih tinggi penggunaan computer sendiri untuk perkuliahan ditunjang ketersediaan internet dan kepemilikan handphone yang dapat membantu perkuliahan namun hanya sebagian kecil dari total jumlah pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU. Data dimaksud hanya menggambarkan kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan perangkat digital, bukan untuk mendeteksi konten dan materi pengetahuan yang didesiminasikan sehingga penilaian ideal dari literasi digital belum dapat disimpulkan seberapa besar point yang dimiliki pelajar/mahasiswa di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan.

5) Rentang Jangkauan Pendidikan di Wilayah Perbatasan

Bagian akhir artikel ini membahas tentang parameter angka partisipasi pendidikan yang dipengaruhi oleh rentang jangkauan mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendidikan, serta kesempatan menjangkau di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kesempatan menjangkau dimaksudkan bahwa adanya dorongan sosial, budaya dan psikologi dari diri dan keluarga untuk mengikuti kegiatan pendidikan pada kategori tingkatan pendidikan tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah analisis keterjangkauan lokasi yang mengindikasikan seberapa mudah atau sulitnya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain yang ditentukan oleh jarak tempuh, waktu tempuh, biaya dan hambatan medan sehingga berpengaruh terhadap pilihan daya tarik partisipas bersekolah.

Fasilitas pendidikan pra sekolah berupa PAUD/TK tersedia merata pada setiap desa dan semakin banyak terdapat di setiap desa/kelurahan urban, dengan margin 3,34 point partisipasi yang lebih tinggi dari anak perempuan dibanding anak laki-laki

yang beralasan kesempatan untuk menjangkau fasilitas pendidikan. Anak usia 5-6 tahun di wilayah perkotaan lebih tinggi partisipasinya dibanding anak-anak di pedesaan dengan margin point 0,82 karena beban biaya penunjang cenderung mahal sementara urusan pra sekolah belum menjadi kewajiban mutlak dalam jenjang pendidikan formal 12 tahun. Rentang jangkauan anak pra sekolah di perkotaan justru semakin jauh bukan karena ketiadaan TK/PAUD terdekat melainkan pilihan lokasi sekolah yang disesuaikan dengan pertimbangan lainnya seperti efisiensi waktu dan kesempatan antar-jemput.

Kondisi SD/ sederajat di Kabupaten Belu memiliki fasilitas yang cukup tersedia merata dan terletak cukup strategis untuk dijangkau dari permukiman, bahkan di wilayah perkotaan tersedia lebih dari 2 unit SD/ sederajat pada tiap desa/ kelurahan sehingga membuat pilihan bersekolah lebih variatif antar yang terdekat atau terbaik layanan mutu sekolahnya. Jarak tempuh anak usia 7-12 tahun di pedesaan justru jauh lebih pendek jika dibanding anak dengan usia yang sama di perkotaan karena masyarakat perkotaan memiliki kesempatan lebih untuk memilih sekolah yang disukai meskipun tidak mengikuti aturan zonasi sekolah. Anak perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjangkau pendidikan dasar karena kesadaran pentingnya bersekolah sudah dimulai pada usia 8 tahun sehingga masa rentan putus sekolah justru terjadi di awal bersekolah namun jika sudah mendapatkan kenyamanan dari lingkungan sekolah maka cenderung akan terus bersekolah hingga usia 12 tahun.

Anak usia 13 sampai 15 tahun di kedua kabupaten meskipun terbaca data mengalami penurunan APS namun potensi putus sekolah relatif kecil kecuali anak di wilayah pedesaan pada usia 15 tahun sehingga fase rawan anak putus sekolah terjadi pada akhir jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Fasilitas cukup tersedia meskipun belum merata menjangkau semua basis permukiman namun cukup memenuhi rasio kebutuhan anak sederajat, demikian pula keterjangkauan yang sedang dan kesempatan menjangkau yang relatif rendah di pedesaan. Anak usia sekolah SMP/ sederajat harus menjangkau lebih dari 3 Km ke sekolah karena tidak memiliki alternatif lain memilih sekolah, sementara kondisi di perkotaan justru sebaliknya yaitu lebih dari 5 Km karena bervariasi memilih sekolah terbaik yang diinginkan.

Ketersediaan fasilitas pendidikan SMA/ sederajat di kedua kabupaten masih terbatas tidak merata dengan keterjangkauan rendah dan kesempatan menjangkaunya juga cenderung rendah. Kondisi di perkotaan sudah cukup representatif tersedia fasilitas dan mudah terjangkau jika sekolah memiliki class size yang besar untuk menampung sejumlah siswa di lingkungan terdekatnya, sementara secara parsial anak di pedesaan harus meninggalkan kampung dalam periode mingguan untuk menjangkau SMA/ sederajat yang jarak tempuhnya lebih dari 10 Km dari daerah asal. Angka partisipasi lebih rendah pada periode akhir sekolah bagi anak di pedesaan usia 17 tahun karena tingkat kejenuhan meningkat seiring kesempatan menjangkau yang rendah bagi anak perempuan.

Deskripsi kondisional diatas mengisyaratkan bahwa ketersediaan semua fasilitas pendidikan relatif terpenuhi untuk semua tingkatan pendidikan di perkotaan maupun di pedesaan namun keterjangkauan relatif rendah karena kendala alternatif pilihan lokasi sekolah berdasarkan tempat tinggal dan kepentingan domestik dalam proses antar-jemput. Ketersediaan unit sekolah sudah merata berdasarkan rasio kebutuhan anak usia sekolah namun daya tampung dan ketersediaan fasilitas

penunjang yang masih terbatas untuk menopang proses pembelajaran sehingga diharapkan mampu teratasi seiring dukungan kesempatan menjangkau yang perlahan mengalami peningkatan. Dukungan masyarakat di lingkungan sekolah sangat dibutuhkan untuk menciptakan kenyamanan peserta didik selama di luar waktu sekolah, sehingga kepada pihak sekolah dan penyelenggara pendidikan dapat berkolaborasi mewujudkannya tidak hanya melalui wadah komite sekolah. Budaya bersekolah menjadi pemicu masyarakat masih konsisten untuk terus bersekolah sehingga angka partisipasi setiap tahunnya mengalami kenaikan namun kehilangan APS antar jenjang pendidikan dipengaruhi faktor eksternal sehingga perlu diperhatikan fase rawan putus sekolah yaitu pada akhir dan awal masa sekolah di tiap tingkatan pendidikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan diskusi pada bagian hasil dan pembahasan maka dirumuskan beberapa simpulan sekaligus direkomendasikan beberapa point berikut;

1. Ketimpangan sarana prasarana pendidikan terjadi di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan tapi sifanya kondisional yang dapat menopang *minimum condition for good learning* sehingga diharapkan kreatifitas pengelola pendidikan setempat mampu mengakselerasikan kreativitas guru untuk memaksimalkan potensi yang terbatas di wilayahnya.
2. Tingkat keterjangkauan rendah karena pemberlakuan disiplin waktu kegiatan belajar mengajar cenderung mengganggu kebiasaan siswa dalam rutinitas domestik sehingga harus ada kebijakan inklusif dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan kepulauan untuk mengembangkan kurikulum merdeka belajar yang memberikan kesempatan lebih untuk beraktivitas di luar sekolah.
3. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan seyogyanya tidak hanya pada sekolah beserta berbagai fasilitas penunjang didalamnya tapi ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang yang memfasilitasi keterjangkauan akses terhadap layanan pendidikan seperti jalan dan jembatan juga dibutuhkan dari bidang pembangunan non pendidikan sehingga dibutuhkan sinergisitas perencanaan pembangunan yang diharapkan menopang daya tarik dan meningkatkan partisipasi bersekolah.
4. Rasio kebutuhan sekolah sudah cukup terpenuhi tapi berpotensi kurang seiring kecenderungan naiknya APS maka direkomendasikan untuk mengantisipasi ketersediaan, kelayakan, dan keterjangkauan sarana prasarana pendidikan utama maupun penunjang kedepannya. Sistem zonasi terbatas dapat dimanfaatkan untuk mengakomodir kesempatan bersekolah bagi masyarakat sekitar lingkungan pendidikan.
5. Faktor yang tidak diperhitungkan dalam orientasi mutu lulusan adalah dukungan sosial budaya dari masyarakat di sekitar lingkungan sekolah yang harus dikonsolidasikan dari dalam sekolah maupun oleh pemerintah desa/desa setempat agar mampu menciptakan budaya literasi sosial dan digital yang nyaman bagi peserta didik dalam keberlangsungan kehidupan sosial kemasyarakatan.
6. Masyarakat lokal di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan sudah terbentuk paradigmanya tentang pentingnya bersekolah karena pengalaman baik yang ditunjukkan oleh realitas disekitarnya sehingga dibutuhkan keberanian pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk membangun kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan setempat agar mendorong partisipasi masyarakat.

7. Kebijakan wajib belajar 12 tahun yang tidak memasukan proses pra sekolah sebagai bagian dari jenjang wajib belajar harus dipertimbangkan kembali agar diakomodir sebagai satu kesatuan rangkaian proses wajib belajar 14 tahun untuk mengakomodir kepentingan persiapan awal sebelum bersekolah dan dapat dimanfaatkan untuk implementasi program mengatasi stunting bagi anak usia pra sekolah.
8. Kebijakan pendidikan inklusif harusnya tidak sekedar membatasi keterbatasan fisik dan mental dari peserta didik tapi juga mempertimbangkan ketimpangan sumber daya penunjang penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan sehingga direkomendasikan kepada pemerintah untuk menyediakan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah perbatasan, tertinggal, terpencil dan kepulauan.
9. Pilihan lokasi penempatan sekolah belum mempertimbangkan prospek jangka panjang pengembangan ruang dan wilayah karena potensi pola sebaran basis permukiman masyarakat yang membutuhkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan kepulauan. Jangka menengah dan panjang perlu dilakukan sinkronisasi rencana peruntukan ruang permukiman yang memadukan ketersediaan segenap fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya dalam satu-kesatuan zonasi.
10. Komponen proses seperti guru dan kurikulum menjadi parameter penting dalam pencapaian output mutu pendidikan tetapi dalam artikel ini bukan menjadi variabel yang dipotret sehingga direkomendasikan untuk mempertimbangkan kedua parameter dimaksud bagi peneliti lanjutan.

REFERENSI

- Arriani, F. (n.d.). *Pendidikan Inklusif - Direktorat PMPK*. <https://pmpk.kemdikbud.go.id/https://pmpk.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/04/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>
- BPS NTT, B. N. (n.d.). *Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara timur 2023*. <https://ntt.bps.go.id/id/publication/2024/05/16/af2a444f08ff857d1ea86a63/statistik-pendidikan-provinsi-nusa-tenggara-timur-2023.html>
- Bappenas (Ed.). (n.d.). *Peta Jalan sdgs indonesia - menuju 2030 - bappenas*. https://sdgs.bappenas.go.id/https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf
- Benavot, A. (2016). Assuring quality education and learning: Lessons from Education for All. *Prospects*, 46, 5-14.
- Demetriou, A., & Spanoudis, G. (2018). *Growing minds: A developmental theory of intelligence, brain, and education*. Routledge.
- Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(1), 3.
- Erianjoni¹, E., Beri, D., & Yusra¹, A. (2023, January). Contextual Sociology Teaching Materials for High School Sociology Learning. In *Proceedings of the Unima*

International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022) (Vol. 698, p. 189). Springer Nature.

- Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 79-100.
- JinJie, X. (2023). *Reassessing Vocational Education in China: A Perspective from PISA*. Routledge.
- Kennedy, P. S. J., Tobing, S. J. L., Toruan, R. L., Tampubolon, E., & Nomleni, A. (2019, May). Isu Strategis Kesenjangan Pendidikan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 2, No. 1, pp. 619-629).
- King, M. (2023). Doing MOOCs in Dili: Southern agency and open online learning in Timor-Leste.
- Mamengko, K. M., Tobu, E., & Arman, Y. (2023). Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dan Negara Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(5), 10-24.
- Nama, D. Y., & TANGGUR, F. S. (2022). Disparitas Media Pembelajaran Pada Era Digitalisasi Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Ri-Rdtl (Refleksi Pembelajaran Online Daerah Perbatasan). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 5(2), 295-305.
- Nong, R. (2024, June 5). *News analysis Pinjam Pakai Gedung Sekolah, Pengamat: Libatkan OPD Urusan Perbatasan*. Pos-kupang.com. <https://kupang.tribunnews.com/2024/06/05/news-analysis-pinjam-pakai-gedung-sekolah-pengamat-libatkan-opd-urusan-perbatasan>
- OECD. (2019). An OECD Learning Framework 2030. *The Future of Education and Labor*, 23-35.
- Purwanti, Y. (2022). Disparitas Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pengajar Sekolah Menengah Atas di Indonesia Menggunakan Metode Spatial Fuzzy C-Means. *Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa*, 12(02), 15-22.
- RI, B. (n.d.). *Laporan Kinerja 2023 Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan*. Publikasi - Badan nasional pengelola perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). <https://bnpp.go.id/publikasi>
- Rokhman, F., Hum, M., & Syaifudin, A. (2014). Character education for golden generation 2045 (national character building for Indonesian golden years). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 141, 1161-1165.
- Tanggur, A. S. P. K. (2024, January 26). *Begini Kata Pengamat soal Anak kaskostrad Mengajar Bahasa Indonesia di Perbatasan Timor leste*. Pos-kupang.com. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/26/begini-kata-pengamat-soal-anak-kaskostrad-mengajar-bahasa-indonesia-di-perbatasan-timor-leste>
- Widiputera, F., & Agung, I. (2023). Mr. Private University Barriers to World-Class Education: The Case of Indonesia. *Journal of Research and Educational Research Evaluation*, 12(2), 100-112.

Wijayanti, P. R., Suwartono, T., & Kusuma, L. (2022). Perception of vocational school students towards online learning and their TOEIC scores. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 4(1), 35-41.

Wulakada, H. H. (n.d.), 2021, *Login: Jurnal Geografi*. Login | Jurnal Geografi.
<http://ejournal.undana.ac.id/index.php/jgeo/issue/view/417>